



PERLAWANAN KYAI INDRAMAYU TERHADAP PENJAJAH JEPANG TAHUN 1944: STUDI *HISTORIS-SOSIOLOGIS* ATAS PERLAWANAN PETANI KAPLONGAN

Hudallah

Faculty of Ushuluddin, IAI Ma'arif Darul Fikri Indramayu, Indonesia
hudajeh9@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: Maret 2026
Accepted: Mei 2026

Revised : April 2026
Available online : Juni 2026

How to Cite: Hudallah, H. *The Resistance of Indramayu Kyai Against the Japanese Occupation in 1944: A Historical-Sociological Study of the Kaplongan Peasant Resistance*. *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi Dan Pemerintahan*, 2(2), 56-60. <https://doi.org/10.61166/ld.v2i2.40>

ABSTRACT

This study aims to analyze the resistance of the Kaplongan community in Indramayu against the Japanese occupation government in 1944, with particular emphasis on the role of kyai (Islamic religious leaders) as socio-religious leaders. The resistance was not solely triggered by economic factors, particularly the compulsory rice procurement policy imposed by the Japanese authorities, but was also influenced by socio-political and religious factors. This research employs a historical method with a historical-sociological approach through literature review and analysis of various historical sources. The findings reveal that the kyai played a crucial role in fostering collective awareness among the community to oppose Japanese policies, which were perceived as oppressive and contrary to Islamic values. Prominent figures such as K.H. Arsyad, H. Aksan, and Kyai Sidik emerged as central leaders who successfully consolidated peasant resistance against Japanese colonial policies. The Kaplongan resistance demonstrates that religion functioned not only as a source of spiritual guidance but also as a foundation of social and political legitimacy within anti-colonial movements. This event represents a significant form of local resistance, illustrating the close relationship between religious leadership and rural social movements during the Japanese occupation period in Indonesia.

KEY WORDS: *Kyai, Indramayu, Japanese Occupation, Kaplongan, Peasant Resistance, Social Movement*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlawanan masyarakat Kaplongan, Indramayu, terhadap pemerintah pendudukan Jepang pada tahun 1944 dengan menitikberatkan pada peran kyai sebagai pemimpin sosial-keagamaan. Perlawanan yang terjadi tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi berupa kebijakan penyerahan wajib padi, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial-politik dan keagamaan. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan pendekatan historis-sosiologis melalui studi pustaka dan analisis berbagai sumber sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para kyai memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menentang kebijakan Jepang yang dianggap menindas dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tokoh-tokoh seperti K.H. Arsyad, H. Aksan, dan Kyai Sidik menjadi figur sentral yang mampu mengkonsolidasikan kekuatan petani dalam menghadapi kebijakan kolonial Jepang. Perlawanan Kaplongan membuktikan bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai sumber spiritual, tetapi juga sebagai basis legitimasi sosial dan politik dalam gerakan anti-kolonial. Peristiwa ini menjadi salah satu bentuk resistensi lokal yang memperlihatkan hubungan erat antara kepemimpinan keagamaan dan gerakan sosial masyarakat pedesaan pada masa pendudukan Jepang.

KATA KUNCI: *Kyai, Indramayu, Jepang, Kaplongan, Perlawanan Petani, Gerakan Sosial.*

INTRODUCTION

Pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942–1945 membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan masyarakat. Pada awal kedatangannya, Jepang memperoleh sambutan positif dari sebagian masyarakat Indonesia karena dipandang sebagai pembebas dari kolonialisme Belanda. Jepang bahkan membangun propaganda sebagai “saudara tua” yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari imperialisme Barat (Benda, 1983). Akan tetapi, harapan tersebut tidak berlangsung lama karena kebijakan Jepang justru menimbulkan berbagai bentuk eksploitasi terhadap rakyat Indonesia.

Di wilayah Indramayu, kebijakan Jepang sangat dirasakan oleh masyarakat petani. Jepang menjadikan daerah ini sebagai salah satu lumbung pangan utama karena Indramayu merupakan kawasan agraris yang memiliki produksi padi tinggi. Pemerintah militer Jepang menerapkan kebijakan wajib serah padi, pengerahan tenaga kerja paksa (*romusha*), pembentukan organisasi kontrol sosial seperti *Tonarigumi*, serta berbagai bentuk mobilisasi masyarakat demi kepentingan perang Asia Timur Raya (Hudallah, 2018).

Tekanan ekonomi akibat penyerahan hasil panen dan kontrol ketat terhadap kehidupan masyarakat menimbulkan keresahan luas. Di samping faktor ekonomi, muncul pula persoalan keagamaan. Kebijakan penghormatan terhadap Kaisar Jepang melalui praktik *seikeirei* dipandang oleh sebagian ulama sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam karena menyerupai praktik penyembahan selain Allah (Poesponegoro & Notosusanto, 1993).

Dalam konteks tersebut, para kyai tampil sebagai pemimpin sosial yang memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin agama, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Perlawanan petani Kaplongan tahun 1944 menjadi salah satu contoh penting bagaimana kepemimpinan keagamaan mampu menggerakkan masyarakat pedesaan untuk menentang kebijakan kolonial Jepang.

Penelitian ini penting karena memberikan pemahaman mengenai hubungan antara agama, kepemimpinan lokal, dan gerakan sosial dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia. Selain itu, kajian ini memperkaya historiografi lokal Indramayu yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian dibandingkan perlawanan-perlawanan besar lainnya di Indonesia.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (*historical method*) dengan pendekatan historis-sosiologis. Metode sejarah dilakukan melalui tahapan heuristik, kritik sumber,

interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 1983; Kuntowijoyo, 1995).

Penelitian dilakukan pada tahun 2017. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku karya Hudallah (2018), berbagai literatur sejarah nasional, jurnal ilmiah, arsip kolonial, serta dokumen yang berkaitan dengan masa pendudukan Jepang. Pendekatan historis-sosiologis digunakan untuk memahami hubungan antara kondisi sosial masyarakat Kaplongan dengan munculnya gerakan perlawanan yang dipimpin para kyai.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji faktor-faktor penyebab perlawanan, peran tokoh-tokoh agama, serta dampak sosial-politik yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut.

RESULTS AND DISCUSSION

Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Kaplongan pada Masa Pendudukan Jepang

Kebijakan ekonomi Jepang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan perang. Oleh karena itu, seluruh sumber daya yang dimiliki wilayah jajahan diarahkan untuk mendukung kepentingan militer Jepang. Di Indramayu, kebijakan tersebut diwujudkan melalui sistem penyerahan wajib padi kepada pemerintah pendudukan dengan harga yang ditentukan secara sepihak (Hudallah, 2018).

Kondisi ini menyebabkan petani kehilangan kebebasan dalam mengelola hasil panennya. Sebagian besar produksi pertanian harus diserahkan kepada pemerintah sehingga kesejahteraan masyarakat menurun drastis. Kelangkaan bahan makanan, kemiskinan, dan kelaparan menjadi fenomena yang semakin sering terjadi di berbagai wilayah Jawa (Kurasawa, 2015).

Selain itu, Jepang juga menerapkan sistem pengawasan sosial melalui Tonarigumi yang memungkinkan kontrol ketat terhadap kehidupan masyarakat. Melalui sistem ini, pemerintah dapat mengawasi distribusi pangan, mobilisasi tenaga kerja, serta aktivitas masyarakat sehari-hari. Akibatnya, ruang gerak masyarakat menjadi sangat terbatas.

Peran Kyai dalam Kehidupan Masyarakat Kaplongan

Dalam masyarakat pedesaan Jawa, kyai memiliki posisi yang sangat strategis. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin sosial, mediator konflik, dan sumber legitimasi moral (Wahid, 2001).

Di Kaplongan, tokoh-tokoh seperti K.H. Arsyad, H. Aksan, dan Kyai Sidik memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat. Keberadaan mereka menjadi faktor penting dalam membangun solidaritas sosial masyarakat petani. Para kyai tersebut dipandang memiliki otoritas keagamaan sekaligus kharisma yang mampu mempersatukan masyarakat dalam menghadapi tekanan pemerintah Jepang.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sartono Kartodirdjo (1984), sebagian besar gerakan perlawanan petani di Indonesia dipimpin oleh tokoh-tokoh agama atau elite lokal yang memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat. Fenomena yang sama juga terlihat dalam perlawanan Kaplongan.

Faktor-Faktor Pemicu Perlawanan

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama munculnya perlawanan. Kebijakan wajib serah padi menyebabkan petani kehilangan hasil panennya dan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sistem distribusi pangan yang dikendalikan pemerintah Jepang semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Faktor Sosial dan Politik

Selain faktor ekonomi, kebijakan kontrol sosial yang diterapkan Jepang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Pengawasan yang ketat, pembatasan kebebasan bergerak, serta tindakan represif aparat pemerintah menciptakan ketegangan sosial yang terus meningkat.

Peristiwa penangkapan H. Aksan oleh aparat Jepang menjadi titik balik yang memicu

kemarahan masyarakat. H. Aksan dipandang sebagai tokoh yang dihormati sehingga penangkapannya dianggap sebagai penghinaan terhadap masyarakat Kaplongan secara keseluruhan.

Faktor Keagamaan

Faktor keagamaan juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Kebijakan *seikeirei* yang mewajibkan penghormatan kepada Kaisar Jepang dipandang bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Para kyai menilai praktik tersebut sebagai bentuk kemusyrikan sehingga harus ditolak.

Penolakan terhadap kebijakan ini memperkuat legitimasi religius bagi gerakan perlawanan. Dalam perspektif masyarakat, melawan Jepang tidak hanya dipandang sebagai tindakan politik, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan keagamaan.

Dinamika Perlawanan Petani Kaplongan

Perlawanan petani Kaplongan meletus pada April 1944. Ketegangan bermula dari kebijakan pengambilan padi milik masyarakat dan tindakan aparat yang dianggap semena-mena. Konflik kemudian berkembang menjadi gerakan perlawanan terbuka terhadap pemerintah Jepang.

Masyarakat yang telah lama mengalami tekanan ekonomi dan sosial melakukan perlawanan secara spontan. Dalam prosesnya, para petani memperoleh dukungan moral dan spiritual dari para kyai. Dukungan tersebut memperkuat keyakinan masyarakat untuk menghadapi risiko yang mungkin terjadi.

Meskipun pada akhirnya Jepang berhasil menumpas gerakan tersebut dan menangkap sejumlah tokoh perlawanan, peristiwa Kaplongan menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan memiliki kapasitas untuk melakukan resistensi terhadap kekuasaan kolonial.

Makna Historis Perlawanan Kaplongan

Perlawanan Kaplongan memiliki makna historis yang penting dalam sejarah Indonesia. Pertama, peristiwa ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap Jepang tidak hanya terjadi di daerah-daerah besar seperti Aceh dan Tasikmalaya, tetapi juga berkembang di wilayah pedesaan seperti Indramayu.

Kedua, peristiwa ini membuktikan bahwa agama dapat menjadi sumber mobilisasi sosial yang efektif dalam menghadapi ketidakadilan. Kyai berperan sebagai agen perubahan yang mampu menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan perjuangan sosial masyarakat.

Ketiga, perlawanan Kaplongan memperlihatkan pentingnya kepemimpinan lokal dalam membangun solidaritas masyarakat. Tanpa kehadiran para kyai dan tokoh masyarakat, gerakan tersebut kemungkinan tidak akan memperoleh dukungan yang luas dari masyarakat petani.

CONCLUSION

Perlawanan petani Kaplongan terhadap penjajah Jepang tahun 1944 merupakan salah satu bentuk resistensi lokal yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial-politik, dan keagamaan. Kebijakan wajib serah padi, sistem kontrol sosial yang represif, serta praktik *seikeirei* menjadi pemicu utama munculnya gerakan perlawanan.

Kyai memiliki peran strategis sebagai pemimpin sosial-keagamaan yang mampu menggerakkan masyarakat untuk menentang kebijakan Jepang. Tokoh-tokoh seperti K.H. Arsyad, H. Aksan, dan Kyai Sidik menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap ketidakadilan kolonial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai sumber legitimasi sosial dan politik dalam gerakan perlawanan rakyat. Oleh karena itu, perlawanan Kaplongan merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme Jepang.

BIBLIOGRAPHY

Abdul Djamil. (2001). *Perlawanan Kyai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam*. K.H. Ahmad Rifai

- Kalisasak. Yogyakarta: LKiS.
- Amin, Z., dkk. (2015). *Baban Kana: Sejarah Pesantren Babakan Ciwaringin dan Perang Nasional Kedondong 1802–1919*. Bandung: Humaniora.
- Arikunto, S. (2003). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Benda, H. J. (1983). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Dasuki, A., dkk. (1977). *Sejarah Indramayu*. Indramayu.
- Faisal, S. (2001). *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gottschalk, L. (1983). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Hardjasaputra, A. S., & Haris, T. (2011). *Cirebon dalam Lima Zaman*. Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat.
- Herkusumo, A. P. (1981). *Chuo Sangi-In: Dewan Pertimbangan Pusat pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hudallah. (2018). *Perlawanan Kyai Indramayu terhadap Penjajah Jepang Tahun 1944: Studi atas Perlawanan Petani Kaplongan Indramayu*. Indramayu: Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra.
- Ibrahim, J. (2004). *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan*. Wonogiri: Bina Citra Pustaka.
- Iryana, W. (2016). *Protes Sosial Petani Indramayu Masa Kependudukan Jepang*. *Patanjala*, 8(3), 285–302.
- Kahin, A. (2005). *Dari Pemberontakan ke Integrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kartodirdjo, S. (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- _____. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Kurasawa, A. (2015). *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942–1945*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Legawa, I. W. (2009). *Gerakan Politik pada Masa Penjajahan Jepang*. *Sejarah dan Budaya*, 2(2), 41–58.
- Moleong, L. J. (1991). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noer, D. (1982). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: LP3S.
- Ojong, P. K. (2006). *Perang Pasifik*. Jakarta: Kompas.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M. C. (1991). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Salim, M. (1971). *Ichisar Sedjarah Perang Dunia II*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI.
- Syamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Utomo, C. B. (1995). *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Wahid, A. (2001). *Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.